

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat. Pada triwulan IV 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tetap tinggi yakni 5,01% year on year (yoy). Year on year atau yang sering disebut dengan (yoy) digunakan untuk membandingkan kondisi ekonomi, keuangan atau bisnis dari tahun ke tahun. Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melambat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan tahun 2022 tercatat 5,31% (yoy), jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3,70% (yoy). Berdasarkan data diatas, pertumbuhan perekonomian Indonesia semakin berkembang. Dalam hal ini, tentunya dalam sebuah perusahaan atau instansi menginginkan suatu keberhasilan terhadap tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Agar tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, maka perusahaan memerlukan sumber daya manusia atau pegawai. Menurut (Hasibuan, 2007) Pegawai adalah setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaganya (fisik dan pikiran) kepada perusahaan dan memperoleh balas jasa yang sesuai dengan perjanjian. Untuk mencapai tujuan perusahaan, dibutuhkannya balas jasa atau bayaran yang sesuai bagi pegawai, yang dapat menjadi salah satu usaha untuk memacu kinerja pegawai.

Menurut (Mulyadi, 2010) menyebutkan bahwa gaji merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer yang dibayarkan secara tetap per bulan, sedangkan upah pada umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) yang dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. Pada perusahaan manapun gaji ataupun upah menjadi sebuah hal yang sangat penting karena itu adalah sebuah faktor internal setiap karyawan dan menimbulkan semangat serta performa yang baik dalam bekerja. Dalam melakukan pengelolaan gaji diperlukan penanganan yang tepat, teratur dan efektif agar tidak terjadinya sebuah kesalahan dalam pemberian gaji. Maka dari itu diperlukan suatu sistem akuntansi penggajian yang baik, agar dalam pelaksanaan penggajian

kepada pegawai dapat berjalan dengan efektif, tanpa terjadinya kecurangan dalam proses penggajian tersebut.

Menurut (Mulyadi, 2016) sistem akuntansi penggajian adalah sistem yang dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji karyawan dan pembayarannya. Dalam sistem akuntansi penggajian dibutuhkan sebuah ketelitian dalam penetapan, penggolongan, pencatatan serta pembayaran gaji. Sistem akuntansi penggajian pada perusahaan biasanya melibatkan beberapa fungsi yang ada didalamnya yaitu fungsi kepegawaian, fungsi pencatat waktu hadir, fungsi pembuat daftar gaji, fungsi keuangan dan fungsi akuntansi. Dalam pemberian gaji perusahaan atau instansi memerlukan pembuatan daftar gaji agar tidak terjadi sebuah kesalahan yang mengakibatkan kecurangan atau ketidakadilan dalam memberikan gaji kepada pegawai. Maka dari itu, diperlukannya sebuah sistem akuntansi penggajian yang baik dalam pembayaran gaji.

UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah DPRD merupakan Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD Provinsi Sumatera Barat pemerintahan yang sudah tentu didalamnya ada pegawai, anggota dewan, pimpinan serta komponen pendukung lainnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD terkadang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD dibantu oleh staf yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang disebut dengan Sekretariat DPRD. Begitupun dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang memerlukan staf yang dapat membantu tugas dan fungsinya, maka dibentuk Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat membantu tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan pelayanan berupa pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah satunya ialah Surat Perintah Membayar (SPM) belanja gaji pegawai.

Oleh karena itu, mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan APBN belanja gaji pegawai seperti gaji pokok dan tunjangan. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat harus memiliki sistem akuntansi penggajian pegawai yang efektif berdasarkan jabatan dan

golongannya, agar tidak terjadinya kesalahan dalam pembayaran gaji pada setiap pegawai.

Maka dari penjelasan yang telah penulis uraikan pada paragraf diatas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sistem akuntansi penggajian pegawai yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat secara lebih spesifik. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik membuat tugas akhir dengan judul **“Sistem Akuntansi Penggajian terhadap Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat”**

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana sistem akuntansi penggajian terhadap pegawai negeri sipil Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang dapat dicapai dari pelaksanaan kegiatan magang ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem akuntansi penggajian terhadap pegawai negeri sipil pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi pada Diploma III Universitas Andalas.
3. Untuk menambah pengalaman, informasi dan pengetahuan mahasiswa serta dapat mempraktikkan ilmu yang telah didapatkan dalam dunia kerja.

### **1.3.2 Manfaat dari kegiatan magang**

Penulis berharap agar penulisan akhir ini memberikan kontribusi untuk berbagai pihak, diantaranya yaitu:

1. Untuk memberikan informasi bagi semua pihak tentang bagaimana sistem akuntansi penggajian terhadap pegawai negeri sipil Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menambah wawasan bagi penulis dan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah, pemahaman dan pengalaman selama di dunia kerja, serta mengimplementasikan teori yang penulis dapat di dunia kerja.

3. Untuk menambah pengetahuan literatur dan wawasan bagi pembaca, Sehingga hal tersebut dapat dipergunakan sebagai referensi bagi penulis lainnya.

#### **1.4 Tempat dan Waktu Magang**

Magang atau kuliah kerja praktek ini dilaksanakan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat selama 2 (dua) bulan, yaitu 40 hari kerja, yang hari kerjanya yaitu hari Senin s/d Jumat. Pelaksanaan magang dimulai dari 9 Januari 2023 – 9 Maret 2023.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam pembahasan yang akan dibahas, penulis memberikan sistematika sesuai dengan pokok pembahasan, adapun sistematika tersebut adalah:

##### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan yang berisikan hal-hal yang akan dibahas dalam tugas akhir.

##### **BAB II : Landasan Teori**

Bab ini membahas mengenai landasan teori yang dipakai dalam studi dari pembahasan mengenai pengertian

##### **BAB III : Gambaran Umum**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah institusi, visi dan misi, uraian tugas dan struktur institusi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

##### **BAB IV : Pembahasan**

Bab ini membahas masalah yang diangkat. Mengemukakan data yang telah diperoleh selama kegiatan magang, yaitu bagaimana sistem akuntansi penggajian terhadap pegawai negeri sipil pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

##### **BAB V : Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan demi kelangsungan aktivitas perusahaan, dan juga bermanfaat untuk mahasiswa yang akan melaksanakan praktek kerja atau magang.



